

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Kursi Deputy Harus Diisi Era Pj Gubernur

Penjabat gubernur DKI tidak didampingi wagub saat memerintah pemprov.

JAKARTA — Empat posisi deputy gubernur di DKI Jakarta kosong menjelang masa jabatan Gubernur Anies Rasyid Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022. Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif, mendorong agar kursi deputy gubernur diisi saat Ibu Kota dipimpin oleh penjabat (pj) gubernur mulai 17 Oktober 2022 hingga 2024.

Dia menganggap pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk mengisi kekosongan kursi deputy gubernur. Karena hal itu bisa membantu kinerja pj gubernur yang nantinya dalam bekerja tidak didampingi wakil gubernur. "Sebetulnya butuh juga, tapi tidak semua deputy gubernur. Ini sepertinya bisa dipertimbangkan untuk diangkat lagi," kata Syarif kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/9).

Empat posisi deputy gubernur yang kosong, meliputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, serta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Syarif, hanya Deputy Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang tidak terlalu penting atau mendesak untuk diisi. "Karena tugas

pada bidang itu bisa ditangani oleh asisten deputy gubernur dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," katanya.

Menurut Syarif, untuk Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sangat diperlukan. Pasalnya, posisi tersebut berkaitan dengan implementasi Pergub RDTR Nomor 31 Tahun 2022. Sedangkan Deputy Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman dibutuhkan untuk mengakselerasi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

"Kalau Deputy Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi itu juga diperlukan karena sekarang Jakarta masuk masa transisi kepindahan IKN ke Kalimantan Timur," kata Syarif.

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mendukung sosok pj gubernur pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyampaikan, bakal mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati setiap keputusan presiden. "Tentu saya bersama Pak Gubernur Anies akan selesai 16 Oktober. Nanti presiden akan menunjuk pj gubernur siapa pun yang dipilih kita akan hormati, hormati, dan dukung," kata Riza saat ditemui di kan-

tor Wali Kota Jakarta Selatan, Ahad (25/9).

Riza hanya berpesan, pj gubernur terpilih nantinya mampu melanjutkan program pemerintah yang masih terlaksana hingga kini. "Kita dukung untuk terus melanjutkan program Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik lagi," ujar Riza.

Gubernur Anies menjelang purnatugas mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Salah satu poinnya adalah perencanaan kelanjutan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dilakukan hingga 2026. Dia ingin agar pj gubernur meneruskan proyek normalisasi sejumlah sungai. "Fokus padaantisipasi debit air yang belum tertampung melalui peningkatan kapasitas eksisting dan desain sistem drainase," kata Anies.

Dalam pokok pelaksanaan rencana itu, Anies menginstruksikan pengadaan tanah untuk naturalisasi atau normalisasi sungai yang dilakukan pada beberapa lokasi. Di antaranya, Kali Ciliwung, Kali Sunter Cipinang Melayu, Kali Angke, Kali Jatikramat, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut. "Dan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah pusat," kata Anies.

Gubernur Anies dan Wagub Riza akan meletakkan jabatannya pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI telah menyetorkan tiga nama kandidat calon pj gubernur DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Stabil

Ketua Umum Kadin DKI, Diana Dewi, menyoroti Provinsi Jakarta yang akan dipimpin oleh pj gubernur selama dua tahun ke depan. Dia menyampaikan, para pengusaha berharap pj gubernur nantinya bisa menjadi pemimpin yang efektif. "Harapan kami, pj bisa mengentaskan persoalan Jakarta agar tercipta stabilisasi kondisi khususnya di bidang perekonomian," kata Diana, belum lama ini.

■ antara ed: erik purnama putra



Siapa pun yang dipilih kita hormati, hormati, dan dukung.